

HARIAN

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SENIN / 14 September 2020

HARIAN UNTUK UMUM  
TERBIT SENIN - JUMAT  
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com  
Redaksi 031-87854491  
Iklan 031-87854491  
Kantor Redaksi  
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26  
Surabaya

Masih banyak orang tua yang dengan gigihnya memaksa keinginan. Memaksa anak untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Padahal, setiap anak punya keunikan dan bakatnya tersendiri. Lantas akankah kita menggadai kebahagiaan anak demi keinginan pribadi? jangan sampai anak jadi korban egoisme orang tua yaa

**Deddy Corbuzier,**  
Magician, presenter, actor

## PILKADA 2020 DITUNDA, MUNGKINKAH?



SCAN ME

Sejak awal September lalu, belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Rata-rata tambahan kasus perharinya meledak mencapai 3.000 kasus. Padahal di Agustus lalu, rata-rata dikisaran 2.000 kasus baru/harinya. Bahkan per Senin (14/9) hari ini, DKI Jakarta kembali melakukan PSBB ketat. Desakan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 ditunda menguat. Sebab risiko penyebaran wabah sangat tinggi di pesta demokrasi daerah ini. Terbukti hingga tahapan pendaftaran saja sudah ada 63 bakal calon kepala daerah positif corona. Secara aturan mungkinkah Pilkada 2020 ditunda lagi?

Baca Hal 11



### UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	218,382	155,010	8,723
Seluruh Dunia	28,764,183	19,441,711	920,283

Update : 13 September 2020 Pukul 15.27 PM

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

### SYARAT PENUNDAAN PILKADA

Mengutip lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

#### Pasal 120 berbunyi:

“Dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan Pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti.”

#### Pada pasal 122A disebutkan :

“Bahwa pemilihan serentak tersebut dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.”

# PSBB KETAT JAKARTA, SEMOGA BUKAN 'MACAN KERTAS'

Meski pro-kontra membayangi, Gubernur DKI PSBB ketat Jakarta akan dilakukan selama 14 hari hingga 28 September 2020. Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) nomor 88 tahun 2020. Dia menegaskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetap berlaku mulai Senin (14/9) hari ini. Berbagai penyesuaian dilakukan, misalnya untuk rumah ibadah di permukiman masih bisa dibuka dengan jumlah jemaah 50% dari kapasitas. Ojek online (Ojol) juga bisa mengangkut penumpang dengan melakukan protokol kesehatan. Ganjil-genap juga ditiadakan. Semoga tidak berakhir sebagai 'macan kertas' saja.

## Kata Mereka



**Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan**

“Jadi mulai besok semua yang ditemukan positif diharuskan untuk isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Isolasi mandiri di rumah dihindari karena ini berpotensi pada penularan kluster rumah. Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum.”



**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto**

“Jakarta butuh pengelolaan secara mikro seperti Jawa Barat. Jadi harus dilihat secara mikro. Di Jawa Tengah ini kan enggak terapkan PSBB. Nah jadi harus dilihat secara micro management itu penting jadi kita tahu sumbernya, kenapa, sehingga dalam tanda petik kita tidak mengambil langkah overdosis.”



**Pengamat Ekonomi/ Manatan Menkeu, Chatib Basri**

“Orang hanya bisa tinggal di rumah jika ia memiliki tabungan atau mendapat bansos. Jika tidak ada tabungan atau perlindungan sosial orang akan keluar rumah. Karena itu seperti saya katakan PSBB bias memihak kelompok menengah atas jika bansos tidak diberikan. BLT menjadi penting sekali.”



**Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono**

“Tapi, langkah terobosan yang diciptakan Pak Anies kalau saya ibaratkan seperti macan kertas. Kenapa saya katakan macan kertas? Karena kebijakan-kebijakan selama ini dalam rangka penanganan COVID-19 baru hebat sebatas kertas. Namun, implementasinya di lapangan nol besar.”



**Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir,**

“Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Kita tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja.”

## BEBERAPA POIN PENTING PSBB KETAT DI DKI JAKARTA

### Kapasitas Kantor 25%, 11 Sektor Boleh 50%

Berikut 11 sektor yang boleh beroperasi

- Sektor kesehatan
- Bahan pangan dan minuman
- Sektor energi
- Sektor komunikasi dan teknologi informasi
- Sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia
- Sektor logistik
- Perhotelan
- Konstruksi
- Industri strategis
- Sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan objek tertentu
- Sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari

### Ojol Boleh Angkut Penumpang

Berbeda dengan saat awal Corona, ojek online (ojol) boleh mengangkut penumpang dan barang saat PSBB. Ojol diwajibkan menjaga protokol kesehatan.

### Selain Keluarga, Kendaraan Pribadi Maksimal 2 Orang Sebaris

- Kendaraan pribadi hanya boleh mengangkut maksimal satu baris mobil diisi dua orang. Namun aturan ini tidak berlaku jika seluruh penumpang mobil satu tempat tinggal.
- Tidak ada ganjil-genap selama PSBB total

### Kerumunan

Kerumunan di DKI Jakarta tidak boleh lebih dari lima orang

### Institusi Pendidikan Hingga Sarana Olahraga Tutup

Tempat yang harus ditutup secara penuh:

- Sekolah dan institusi pendidikan
- Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
- Taman kota dan RPTRA
- Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
- Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil)

### Restoran hingga Tempat Ibadah Boleh Buka dengan Catatan

Tempat-tempat berikut ini dapat beroperasi

dengan kondisi tertentu:

- Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.
- Restoran, rumah makan, kafe hanya menerima pesan antar/bawa pulang. (Tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat)
- Tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat dapat beroperasi (Tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, misal: masjid raya, dan tempat ibadah yang berada di wilayah zona merah ditutup sementara)

### Transportasi Publik

- Pengendalian TransJakarta, MRT, LRT, KRL Commuter Line, taksi, angkot dan kapal penumpang.
- Dilakukan pembatasan kapasitas, pengurangan frekuensi layanan dan armada.
- Pengurangan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas normal.
- Diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.
- Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.

# KONTROVERSI PREMAN DILIBATKAN POLRI TANGANI CORONA

Belakangan lagi heboh soal pelibatan preman pasar oleh preman untuk menegakan protokol kesehatan warga. Polri berdalih langkah ini aman karena mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri. Banyak yang bereaksi keras atas rencana Polri menggunakan jasa preman pasar untuk mengatur warga menggunakan masker dan protokol kesehatan. Ada yang beranggapan rencana tersebut justru melegalkan keberadaan preman, padahal tugas polisi justru membabat habis preman. Para wakil rakyat di DPRD RI pun berbeda pendapat mengenai rencana ini.

Naskah/Desain grafis : Berbagai Sumber/Paulus Ivan

## JEJAK KASUS CORONA DI PASAR INDONESIA (data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia/IKAPPI)

### Per 13 September 2020

- Pedagang positif terpapar **1.340 orang**
- Angka kematian **47 orang**
- Jumlah pasar yang terdampak **238 pasar**

### Per 5 Agustus 2020

- Pedagang positif terpapar **1.323 orang**
- Angka kematian **41 orang**
- Jumlah pasar yang terdampak **227 pasar**



**Pakar Psikologi Forensik,  
Reza Indragiri Amriel**

"Sehingga, alih-alih efektif sebagai pamong masker, lebih besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kewenangan. Ujung-ujungnya, polisi -selaku perekrut jeger- yang rugi akibat tererosinya kepercayaan masyarakat. Tapi mari kita tafsirkan pernyataan Wakapolri dengan penuh empati. Polisi sesungguhnya pekerjaan superberat. Semakin ampun-ampun di masa pandemi. Tidak sebatas bekerja sebagaimana biasa, polisi sekarang harus menjalankan perpolisian Covid-19 atau Covid-19 policing."



**Anggota Komisi III DPR RI  
dari fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto**

"Semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya jeger/preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal. Kesiapan Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya percaya diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi meligitimasi eksistensi jeger/preman pasar."



**Anggota Komisi III  
DPR RI fraksi Nasdem  
Ahmad Sahroni**

"Saya setuju apa yang diprogramkan Wakapolri. Tapi harus tetap dalam pengawasan TNI-Polri. Agar para preman tidak semena-mena menegor masyarakat, karena mereka ditugaskan dan diperbantukan oleh Polri dan TNI."



**Wakapolri Komjen,  
Gatot Eddy Pramono**

"Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin."

## PANSUS I DPRD BLITAR CEK LOKASI PEMBANGUNAN 3 FASUM DI SUTOJAYAN

Blitar - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Blitar melakukan peninjauan lokasi, yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) di Kecamatan Sutojayan. Ada 3 fasum yang direncanakan yakni Pasar Sutojayan, puskesmas dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Pengecekan lokasi ini bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan (PZ BWP) Sutojayan Tahun 2019 - 2039. Dilakukan di 2 lokasi yakni Kelurahan Jingglong dan Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojayan.

Dituturkan Ketua Pansus I, M Rifai kegiatan lapangan pengecekan lokasi ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti, kondisi sebenarnya dari Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan TPA sampah. "Adapun luas lahan LP2B di Kelurahan Sutojayan total seluas 200,42 hektar," tutur Rifai dikutip, Minggu (13/9).

Lebih lanjut dijelaskan Rifai untuk lahan TPA sampah yang terletak di Kelurahan Jingglong, dirubah sedikit lebih

jauh dari permukiman warga. "Karena ada warga yang keberatan, jika letak TPA sampah terlalu dekat dengan permukiman," jelasnya.

Setelah melakukan cek lokasi untuk TPA sampah, dilanjutkan ke tanah bengkok yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Jingglong dan Kelurahan Kalipang. Tanah bengkok tersebut rencananya akan digunakan untuk puskesmas atau pasar karena dekat dengan jalan umum. "Peninjauan lokasi akan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Sukorejo. Setelah ini akan di rapatkan kembali bersama eksekutif (Pemkab)," papar anggota FPKB ini.

Kunjungan lapangan atau cek lokasi tersebut, di dampingi oleh pihak Dinas PUPR, Muspika Sutojayan dan perangkat desa dan tokoh masyarakat Kelurahan Jingglong dan Kelurahan Sukorejo.

Selain cek lokasi, diakui Rifai kunjungan lapangan itu juga untuk melakukan inventarisasi lokasi yang strategis untuk rencana pembangunan Puskesmas dan Pasar Sutojayan. "Karena ada beberapa pilihan lokasi, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam," untkapnya.



**Pansus I DPRD Blitar Cek Lokasi  
Pembangunan 3 Fasum di Sutojayan**

Sejauh ini ditambahkan Rifai Pansus I masih mencari lokasi yang strategis dan memenuhi syarat, untuk pembangunan Puskesmas dan Pasar Sutojayan. "Selanjutnya akan dilakukan perangkungan, untuk menentukan lokasi mana yang paling bagus untuk puskesmas atau pasar. "Selanjutnya akan dilaksanakan rapat kerja maraton bersama Dinas PUPR, camat, Kelurahan Sutojayan, Kedungbunder, Kalipang dan Kembangarum," pungkasnya. (ais)

## PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI JATIM DENDA RP 250 RIBU MULAI BERLAKU

Pelanggar protokol kesehatan di Jawa Timur bakal dikenai denda sebesar Rp 250 ribu. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur masih berkoordinasi dengan Satpol PP di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk besaran denda lantaran tiap daerah berbeda.

Sanksi tersebut sesuai dengan Per-

aturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sejak 4 September dan diundangkan 7 September lalu itu dijelaskan tentang kewajiban bagi perorangan untuk menggunakan masker me-

nutupi hidung, mulut, hingga dagu.

Selain itu wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pengaturan jaga jarak, penyemprotan disinfektan secara berkala, hingga melakukan upaya deteksi dini juga diatur untuk pelaku usaha.

Naskah/Desain Grafis : Ardini,Lutfi/Paulus Ivan



**KEPALA SATPOL PP JATIM,  
BUDI SANTOSA**

"Bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dikenakan sanksi administratif perorangan yakni mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp250 ribu. Penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan itu diterapkan mulai 14 September 2020 merujuk Pergub yang menjelaskan penerapan terhitung tujuh hari sosialisasi sejak diundangkan."



**WAKIL KETUA DPRD SURABAYA,  
A.H THONY.**

"Kita tidak ingin memberikan beban kepada masyarakat. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk tertib dan disiplin terhadap protokol Covid-19. Kalau ada denda ini sebagai bentuk dari kegagalan Pemkot dalam menjalankan regulasi yang telah dibuat di dalam Perwali. Jadi silakan dievaluasi SAJA. Evaluasinya itu jangan ditingkatkan sanksinya."



**WAKIL SEKERTARIS GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19 KOTA SURABAYA IRVAN WIDYANTO**

"Ini sedang kita kaji dengan melibatkan pakar hukum dan pakar kesehatan masyarakat, termasuk juga dendanya. Jadi, itu nanti bukan hanya diterapkan kepada individu, tapi juga ke badan usaha dan lain sebagainya. Sementara untuk besaran denda, bakal mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 53 tahun 2020 sebesar Rp 250 ribu,"katanya. Kita lebih banyak memberikan sanksi sosial. Sanksi sosial itu kan banyak seperti menyapu jalan, memberi makan ODGJ, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian bisa menyiram tanaman, push up, dan lain-lain."

### SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI PERGUB NOMOR 53 TAHUN 2020

#### SANKSI BERJENJANG

##### Perorangan

- teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp 250 ribu.

##### Pelaku Usaha

- Teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Berikut denda administratif Pelaku Usaha

Usaha Mikro  
Rp 500 ribu  
Usaha Kecil  
Rp 1 juta  
Usaha Menengah  
Rp 5 juta  
Usaha Besar  
Rp 25 juta



##### Catatan

- Besaran denda akan menyesuaikan kemampuan dan kebijakan kabupaten/kota masing-masing
- Pelaku usaha yang kembali melanggar akan dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda pertama.
- Pembayaran denda ini dilakukan melalui Bank Jatim karena uang denda akan masuk dalam kas daerah.
- Disosialisasikan pada masyarakat melalui media sosial, media mainstream, penyebaran brosur dengan melibatkan kelompok dan organisasi masyarakat.

## DAERAH YANG SUDAH BERLAKUKAN DENDA

#### Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

- Sanksi yang diberikan mulai dari teguran, larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat, pembinaan bersifat edukatif, tak diberikan pelayanan publik dalam waktu 14 hari, hingga denda administratif sebesar Rp 100.000.

#### Lebak, Banten

- Ada dua sanksi bagi yang melanggar. Pertama, membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus. Kedua, sanksi denda administratif sebesar Rp 150.000.

#### DKI Jakarta

- Sanksi yang diberikan yaitu penindakan kerja sosial dan denda sebesar Rp 250.000.

#### Jawa Barat

- Besaran denda yang dikenakan yaitu Rp 100.000-Rp 150.000. Ditegaskan bahwa denda ini berlaku siapa pun yang berada di daerah Jabar, termasuk wisatawan.

#### Banjarbaru, Kalimantan Selatan

- Memberlakukan denda uang sebesar Rp 250.000.

#### Gresik, Jatim

- Sanksi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau denda administratif sebesar Rp 150.000.



## CATATAN UNTUK KPU DARI PENYANDANG DISABILITAS

Serpong – Beberapa keluhan terkait aturan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi diungkapkan para penyandang disabilitas. Kepala Bidang Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Mahmud Fasa mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi catatan untuk KPU terhadap pemilih kaum difabel ini. Mayoritas mengenai aturan protokol kesehatan yang menghambat ruang gerak para penyandang cacat ini.

"Yang pertama teman-teman tuna netra tidak usah menggunakan sarung tangan, karena dia tidak bisa membaca braille kan. Teman-teman tuna netra dibantu menggunakan template guruf braille," katanya dikutip Minggu (13/9). Masukan-masukan ini diperoleh usai dilakukan simulasi pilkada di lapangan PTP, Cilenggang, Serpong, Sabtu (12/9).

Menurut Mahmud, apabila tuna netra menggunakan sarung tangan maka mereka tidak akan bisa karena huruf braille tidak dapat teraba dengan baik, mereka cukup menggunakan hand sanitizer.

"Kemudian teman-teman tuna rungu juga meminta agar petugas membuka masker saat berkomunikasi. Karena

mereka kan berkomunikasi dengan gerak bibir sehingga petugas harus membuka masker saat berkomunikasi dengan teman-teman tuna rungu," ujarnya.

Berikutnya, kata Mahmud, bagi teman-teman pengguna kursi roda mengeluhkan apabila mereka memakai sarung tangan, maka mereka akan licin untuk mendorong kursi rodanya. "Kami meminta KPU untuk kedepannya memberikan bantuan kepada teman-teman kursi roda saat menggunakan sarung tangan, karena mereka akan susah untuk mendorong rodanya. Terakhir di DPT itu ada keterangan disabilitas dan normal itu kan tidak bagus ya, bahasanya sangat kasar sekali tidak sesuai dengan Undang-undang," ungkapnya.

Mahmud menyarankan untuk berikutnya di DPT tidak menggunakan normal tapi non-disabilitas. Kalau menggunakan kata normal itu terdengar tidak etis. "Makanya kami minta KPU itu istilahnya diubah, jadi berapa non-disabilitas, berapa disabilitas. Jadi bukan normal, sebut saja non disabilitas," tambahnya.

Sementara Ketua KPU kota Tangerang Selatan Bambang Dwitoro mengatakan bahwa dengan simulasi Pilkada 2020



### KELUHAN KAUM DIFABEL DI PILKADA 2020

- Tuna netra tidak bisa membaca braille bila diwajibkan gunakan sarung tangan.
- Tuna rungu tidak bisa memahami arahan petugas karena petugas bermasker saat berkomunikasi. Karena kelompok ini berkomunikasi dengan gerak bibir.
- Pengguna kursi roda mengeluhkan tidak bisa mendorong kursi rodanya karena tangan licin saat bersarung tangan.

hari ini, pihaknya sudah mencatat beberapa hal termasuk masukan dari penyandang disabilitas. "Tadi saat evaluasi juga sudah dicatat oleh pihak KPU RI, masukan dari teman-teman penyandang disabilitas juga sudah kita catat untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020," singkatnya.(ist)

## GUBERNUR KHOFIFAH RAPATKAN BARISAN ANTISIPASI KLASTER PILKADA DAN KANTOR

Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) karena dinilai lebih efektif daripada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, mengenai makin banyaknya kluster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan perkantoran, Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus merapatkan barisan dengan berkoordinasi secara intens bersama seluruh kepala daerah di Jatim.

"Penanganan Covid-19 ini sangat menarik karena di tiap negara dan daerah terus belajar untuk menemukan format yang sesuai dan efektif sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena, tiap daerah punya situasi sosial, kultural, kepadatan penduduk, risiko penularan dan kapasitas kesehatan yang berbeda-beda. Alhamdulillah di Jatim intervensi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) terbukti lebih efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha, Surabaya, Minggu (13/9).

Khofifah mencontohkan, PSBM yang juga disebut mikro lockdown atau karantina lokal telah dilakukan di Magetan. Seperti di area Pondok Pesantren Temboro. PSBM dilakukan secara ketat dengan mengunci pintu keluar masuk desa, testing massif dan karantina total selama 14 hari. Efek-

tivitas PSBM terbukti karena sampai hari ini sudah tidak ada penyebaran kasus COVID-19 baru dari area tersebut.

Untuk diketahui, mengutip Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ada 45 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masuk zona merah atau risiko tinggi. Dari 45 kabupaten/kota itu, tiga di antaranya berada di Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi, Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Sementara itu, menurut data KPU Jatim hingga kini ada 3 calon yang dinyatakan positif corona yaitu dari Surabaya, Sidoarjo dan Trenggalek. Untuk diketahui ada 41 bakal pasangan calon yang tersebar di 19 Kabupaten dan Kota di Jatim.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merapatkan barisan penanganan pengendalian penyebaran Covid-19. Forkopimda Jatim mengantisipasi munculnya kluster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), perkantoran, dan keluarga.

Khofifah mengatakan semua pihak harus lebih detail mem-break down sekaligus mengantisipasi kluster seperti keluarga, pilkada dan perkantoran. Untuk itu, Forkopimda Jawa Timur melakukan evaluasi dan langkah strategis ke depan memastikan penanganan penyebaran Covid-19 terkendali.



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

"Kita sadari Covid-19 ini merupakan persoalan dunia. Maka, ini menjadi tugas kita untuk membangun soliditas dan solidaritas dengan gerakan seirama menanggulangi penyebaran Covid-19," ujarnya saat Rakor Percepatan Penanganan Covid -19 Jatim di Klub Bunga, Kota Batu beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Sosial ini memastikan saat ini jumlah kasur untuk ruang isolasi sebanyak 6.611 dan ICU isolasi 860. Ia menilai jumlah tersebut masih cukup aman untuk penanganan Covid-19. "Kita pastikan, bed isolasi di Jawa Timur cukup aman. Bed occupancy Rate-nya saat ini 44-49 persen. Artinya persentase ini telah sesuai dengan standar menurut WHO, yakni di bawah 60 persen," tuturnya.(ufi,ist)



*Profil Prilly Laturcongina*

**ARTIS YANG RAJIN  
POSTINGAN INSTAGRAM**

**M**eski sudah memiliki nama besar di layar kaca Tanah Air, artis Prilly Latuconsina tak cuma mengandalkan penghasilan dari profesinya sebagai artis.

Ia juga membuka sejumlah bisnis, serta aktif mengunggah konten di media sosial seperti Instagram.

Nah, akun Instagram Prilly sendiri termasuk akun bisnis. Lewat jenis akun itu, pemilik dapat menjadikan akun Instagram-nya sebagai wadah mengumpulkan pendapatan; melalui kerja sama dengan para pemilik merek atau brand.

Prilly Latuconsina sendiri punya total 37,1 juta pengikut per Kamis (10/9/2020). Sementara, jumlah unggahannya sudah mencapai 5.440 kiriman.

Akun Instagram Prilly termasuk salah satu yang menduduki daftar '10 akun populer Instagram Indonesia', menurut laman analitik pemasaran influence, Nox Influencer.

Rata-rata suka (like) per konten Instagram Prilly mencapai 175,22 ribu, sedangkan rata-rata komentarnya berjumlah 871.

Lalu, bagaimana dengan perkiraan cuan setiap kali Prilly Latuconsina mengunggah foto dan video di Instagram?

Mengutip Nox Influencer, estimasi pendapatan tiap unggahan di Instagram Prilly mencapai Rp114,12 juta.

Angka itu bisa Prilly dapatkan dengan harga Rp68,76 ribu-Rp192,54 ribu per 1.000 kali penayangan (views).

Siapa yang tak mengenal Prilly Latuconsina. Gadis cantik berdarah Ambon-Sunda kelahiran 15 Oktober 1996 ini menjadi idola para remaja utamanya para cowok.

Ia adalah seorang artis cantik yang berprofesi sebagai penyanyi dan juga aktris sinetron dan juga film.

Perjalanan karir gadis imut tersebut dimulai saat umurnya yang masih menginjak 12 tahun. ia bergabung dengan sanggar teater yang bernama Amanda. Awal munculnya Prilly di televisi pada saat ia terpilih menjadi host dalam acara Si Bolang di Trans 7.

Kemudian ia mendapatkan tawaran untuk menjadi host di acara koki cilik. setelah itu ia memulai debut aktingnya dengan bermain dalam sinetron Get



Merried The Series 1.

Melihat kemampuan beraktingnya, kemudian gadis cantik tersebut mulai membintangi beberapa sinetron yang berjudul Hanya Kamu, Monyet Cantik dan Get Merried The Series 2.

Saat usianya menginjak 18 tahun, karirnya mulai naik daun karena perannya sebagai Sisi dalam sinetron unggulan Ganteng-Ganteng Serigala bersama dengan Aliando dan Ricky Cuaca membuat karir para pemain sinetron tersebut naik daun.

Namanya makin populer dikalangan remaja karena keberhasilan sinetron tersebut. Prilly dan Aliando yang menjadi pasangan di sinetron tersebut bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pasangan terfavorit pada masanya.

Tidak hanya memiliki kemampuan akting yang baik, dara kelahiran Tangerang ini juga memiliki suara yang merdu.

Ia pun menjajal untuk terjun ke dunia tarik suara. Prilly merilis album pertamanya yang berjudul Sahabat Hidup.



# ALERGI MATA TAK BISA DISEMBUHKAN SECARA TUNTAS

Foto : Istimewa

Jika mata Anda sering gatal, merah, atau berair, ada kemungkinan Anda memiliki alergi mata alias konjungtivitis alergi. Alergi mata tidak dapat disembuhkan hingga tuntas, tapi Anda bisa meringankan gejalanya dengan cara alami, konsumsi obat, atau terapi.

Alergi mata terjadi ketika zat asing

dari lingkungan masuk ke dalam mata dan memicu respons system imun. Sistem imun menganggap zat asing tersebut sebagai bahaya, lalu mengirimkan histamin dan berbagai senyawa kimia lain untuk melawannya.

Zat yang dapat memicu alergi disebut alergen. Banyak hal di sekitar Anda bisa

menjadi alergen, tapi yang paling umum adalah debu, serbuk sari, dan bulu hewan peliharaan. Inilah yang harus Anda hindari bila Anda menderita alergi mata.

Pertama-tama, kenali dahulu zat yang merupakan penyebab alergi mata Anda.



## Penggunaan Obat

- Bila cara alami tidak berhasil, Anda mungkin memerlukan obat-obatan. Beberapa obat alergi mata dapat dibeli tanpa resep, tapi Anda sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat alergi dari jenis apa pun.
- Obat alergi memiliki sejumlah efek samping dan berpotensi memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Dengan berkonsultasi ke dokter, Anda bisa mengetahui jenis obat yang sebaiknya Anda hindari (1st).

## Jika pemicunya dari dalam rumah (tungau, debu, dll) ini kiatnya

- Tidak menggunakan karpet, permadani, dan perabotan berlapis kain.
- Rutin membersihkan rumah dengan vacuum cleaner serta lap basah untuk permukaan perabot.
- Mencuci dan mengganti seprai, selimut, serta sarung bantal secara berkala.
- Menggunakan bantal dan guling berbahan sintetis.
- Menggunakan humidifier untuk mengatur kelembapan udara di antara 30-50 persen.
- Tidak menggantung banyak pakaian untuk mencegah tumbuhnya jamur.
- Tidak membiarkan hewan peliharaan masuk ke kamar tidur

## Jika pemicunya adalah serbuk sari, coba lakukan tips berikut

- Hindari bepergian saat cuaca berangin dan berdebu, atau ketika serbuk sari sedang banyak-banyaknya (biasanya pagi dan menjelang malam).
- Saat bepergian, hindari area dengan banyak rumput, pohon, dan bunga.
- Gunakan kacamata *wrap-around* bila Anda harus bepergian.
- Segera mandi dan berganti pakaian setelah pulang ke rumah.

**SEHAT ITU  
TERSERAH  
KAMU**



Foto : Istimewa



## APLIKASI HI APP, ASLI BIKINAN ANAK NEGERI

**P**T Hello Kreasi Indonesia akan merilis aplikasi komunikasi sosial multifungsi, Hi App, yang diklaim dapat mengusik dominasi WhatsApp di Tanah Air.

President Director PT Hello Kreasi Indonesia Evy Amir Syamsudin mengatakan aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, bahkan yang tinggal di wilayah pelosok dengan akses internet yang minim.

Evy mengakui saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan aplikasi seperti Whatsapp, Facebook Messenger atau LINE. Hal ini menjadi tantangan bagi dirinya untuk menarik perhatian masyarakat dan beralih ke Hi App.

"Indonesia itu unik, karena ketika ada aplikasi lokal, kita pasti mau lirik untuk mencoba. Jadi, kami berharap Hi App kedepannya bisa menjadi super app

yang dimanfaatkan banyak orang," ujar Evy dalam siaran pers (Kamis, 10/9/2020).

Hi App tak terbatas pada layanan pesan teks, panggilan suara maupun panggilan video, Hi App juga memiliki fitur penerjemah pesan.

Selain itu, Hi App juga memisahkan daftar personal chat dan group chat pada tab yang berbeda. Terkait group chat, jumlah daya tampung anggota grup di Hi App lebih besar dibandingkan Whatsapp.

Pemisahan antara personal chat dan group chat ini mengingat karakteristik orang Indonesia yang lebih suka berbincang-bincang dan berbagi informasi di grup.

"Fitur penerjemah akan membantu mereka menerjemahkan pesan. Karena kita ingin mempermudah orang saat bekerja dari rumah baik di sektor formal dan informal selama pandemi Covid-19,"

kata Michelle.

Michelle memastikan Hi App dirancang seringan mungkin sehingga bisa berjalan dengan baik dalam berbagai jenis gawai pada tingkatan low-end hingga high-end. Dengan demikian, Hi App diharapkan tak hanya digunakan para pengguna di ibu kota dan kota-kota besar dengan infrastruktur komunikasi mumpuni, melainkan juga menjangkau pengguna di wilayah pelosok (Ist).



**DOUBLE CLEANSING**

Karena sebisa mungkin tidak menggunakan make up, Hailey memberi tips agar para wanita membentuk alis dengan sempurna saat menggunakan masker. "Untuk alis saya, saya suka menyikatnya dan terkadang membuat gel alis bening agar tetap di tempatnya," katanya.

**PILIH BAHAN MASKER**

Sementara dermatologis menyarankan agar menggunakan masker kain yang 100% terbuat dari katun. Pilihan ini menjadi penting karena memberikan kesempatan untuk kulit bernapas. Jika udara panas, maka masker harus sering diganti agar tetap menjadi bersih. "Kamu harus memperlakukan masker seperti pakaian dalam, dan sering-sering mencucinya," ujar dr Candrice Heath, asisten profesor dermatologi di Sekolah Kedokteran Lewis Katz di Universitas Temple.

# Trik Hailey Bieber Cegah Maskne

Ada istilah baru dalam dunia kecantikan yaitu 'maskne' alias mask acne atau jerawat yang dipicu oleh penggunaan masker. Padahal, masker saat ini menjadi benda wajib yang harus dikenakan, terutama saat keluar rumah. Bagi kamu yang mengalami hal yang sama, cobalah dua trik sederhana Hailey Bieber ini. Istri Justin Bieber itu membagikan tipsnya dalam sebuah wawancara dengan majalah Allure. Meski rajin menggunakan masker, dia belum pernah terlihat berjerawat. Padahal kulitnya tergolong sensitif.

**ALIS SEMPURNA**

Karena sebisa mungkin tidak menggunakan make up, Hailey memberi tips agar para wanita membentuk alis dengan sempurna saat menggunakan masker. "Untuk alis saya, saya suka menyikatnya dan terkadang membuat gel alis bening agar tetap di tempatnya," katanya.

**KURANGI PERAWATAN KULIT**

Kurangi memakai skin care rutin ketika kamu rutin pula menggunakan masker. Cukup pakai pembersih wajah non-sabun yang lembut dan pelembab ringan yang tidak memiliki wangi. "Lebih sedikit bahan lebih baik daripada lebih banyak," saran Dr S Tyler Hollmig, direktur bedah dermatologis di Dell Medical School di University of Texas. Cara mencegah jerawat juga bisa dengan memakai pelembab. (ist)

HAILEY  
BALDWIN



## Pilkada 2020 (dari hal 1)

Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 3.636 kasus hari ini, Minggu (13/9). Total ada 218.382 kasus positif. Sebanyak 155.010 di antaranya sembuh dan 8.732 meninggal dunia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, kasus sembuh bertambah 2.552 kasus dan meninggal dunia karena covid-19 bertambah 73 kasus. Untuk jumlah suspek kasus saat ini adalah 97.227 dan jumlah spesimen yang dites adalah 30.100.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan pilkada 2020 apabila jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. "Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan pilkada 2020," kata Bambang.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini terdapat 45 kabupaten / kota yang akan melaksanakan pilkada 2020 yang termasuk dalam zona merah. Bambang pun meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah tersebut.

Menurut Bambang, Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak perlu memaksakan penyelenggaraan apabila situasi cukup riskan. Sebab, kata dia, kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama.

Hal senada diungkapkan Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. "Kluster Pilkada ini jangan dianggap sepele," ingatnya.

Menurut Fachrul Razi, DPD RI melalui Komite I meminta Pemerintah untuk segera mengambil celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya. Fachrul Razi menyatakan, DPD RI dan Komite I sebagai bagian dari masyarakat daerah, tetap meminta Presiden dan penyelenggara sebaiknya menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2021, mengingat semakin masifnya penularan Covid 19 khususnya di daerah yang menyelenggarakan

Pilkada.

Terpisah Komnas HAM menilai ancaman penularan virus Corona saat Pilkada berpotensi terjadinya pelanggaran hak orang lain. "Dengan belum terkendalinya penyebaran COVID-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini maka Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat, selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain," kata Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah. Apalagi selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon Pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan soal penundaan Pilkada tersebut tidak bisa diputuskan hanya oleh KPU, tapi instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan tersebut.

Arief menerangkan, pihaknya bakal melakukan kajian terlebih dahulu

dengan lembaga lainnya. "Nanti akan kita bahas, kan bukan hanya KPU yang terlibat dalam proses penentuan untuk menghentikan dan melanjutkan Pilkada," katanya, di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saat ini, kata Arief, pihaknya sedang fokus melihat kesiapan KPU di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyati mengatakan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Pilkada 2020 merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurut dia, apabila pemerintah dan penyelenggara Pemilu merasa tak mampu dan akan memperburuk situasi maka lebih baik Pilkada ditunda.

"Kalau semakin memperburuk situasi penyebaran covid-19 lebih baik ditunda saja, jangan sampai mempertaruhkan kesehatan publik," ujar Khairunnisa.

Khairunnisa mengatakan Undang-Undang Pilkada tidak memiliki aturan khusus mengenai penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (ist,ins)

### PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Semula  
September  
2020

Perpu  
Nomor 2  
Tahun  
2020

Menjadi Desember 2020  
Jika berencana non alam  
Virus Corona (COVID-19)  
belum berakhir di bulan  
Desember 2020.  
Pemilihan Serentak  
dapat diundur Kembali

### KONTROVERSI PILKADA DI TENGAH PANDEMI

Pemerintah bersikukuh tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di tengah pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada tersebut karena dianggap tak sensitif terhadap kondisi terjadi saat ini.

Berikut proses politik penetapan Pilkada :

**14 April 2020** : Hasil RDP antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu menyepakati Pilkada 2020 disepakati digelar bulan Desember. Dalam rapat masih membuka opsi perubahan dengan menimbang penyebaran Covid-19

**21 April 2020** : Mendagri Tito

keluarkan surat meminta daerah tak mengalihkan dana pilkada

**4 Mei 2020** : Presiden Jokowi meneken Perppu Pilkada yang memuat pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020 Perppu tetap memberi ruang Pilkada diundur

**18 Mei 2020** : Ketua KPU Arief Budiman menyebut tahapan Pilkada akan dimulai pada 6 Juni

**25 Mei 2020** : Koalisi Masyarakat sipil buat petisi minta Pilkada ditunda

**27 Mei 2020** : KPU terima surat rekomendasi dari Gugus Tugas Soal Pilkada Desember



2020

**27 Mei 2020** : Komisi II setuju Pilkada digelar 9 Desember

**27 Mei 2020** : Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada akan tetap digelar pada 9 Desember

**28 Mei 2020** : Pemerintah menyusun protokol Kesehatan Pilkada

# UNICEF: NYAWA JUTAAN ANAK BALITA TERANCAM PANDEMI



Jakarta - Gangguan pada layanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah menempatkan jutaan nyawa tambahan dalam risiko di seluruh dunia. UNICEF memperingatkan bahwa Covid-19 dapat membalikkan kemajuan puluhan tahun dalam upaya mengurangi angka kematian anak.

Dikatakan UNICEF, sebagian besar gangguan mungkin disebabkan oleh ketakutan tertular Covid-19. Tetapi ada risiko besar bagi ibu dan bayi yang menghindari fasilitas kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan virus corona.

Selama 30 tahun terakhir, telah terlihat kemajuan luar biasa dalam mencegah atau mengobati penyebab kematian bayi termasuk kelahiran prematur dan pneumonia. Perkiraan kematian baru yang diterbitkan oleh UNICEF, WHO, dan Kelompok Bank Dunia menemukan bahwa pada tahun 2019 jumlah kematian balita global terendah dalam catatan.

Tahun lalu sekitar 5,2 juta anak meninggal karena penyakit yang dapat dicegah, dibandingkan dengan 12,5 juta

pada tahun 1990. Seperti dilansir laman AFP, dikutip Minggu (13/9), UNICEF memperingatkan bahwa pandemi berisiko membatalkan semua ini dengan menghentikan layanan kesehatan rutin anak dan ibu.

Sebuah survei UNICEF di 77 negara menemukan 68 persen melaporkan setidaknya beberapa gangguan dalam pemeriksaan kesehatan anak dan imunisasi. Henrietta Fore, direktur eksekutif UNICEF, mengatakan bahwa anak-anak dan ibu terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ditolak akses ke perawatan kesehatan karena kasus Covid-19 menghambat infrastruktur nasional.

"Komunitas global telah melangkah terlalu jauh untuk memberantas kematian anak yang dapat dicegah untuk memungkinkan pandemi menghentikan langkah kita," katanya. "Tanpa investasi yang mendesak untuk memulai kembali sistem dan layanan kesehatan yang terganggu, jutaan anak di bawah lima tahun, terutama bayi yang baru lahir, dapat meninggal."

Perawatan neo-natal di negara

berkembang relatif murah dan dapat sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup anak. Misalnya, wanita yang menerima perawatan oleh bidan profesional memiliki kemungkinan 16 persen lebih kecil untuk kehilangan bayinya dan 24 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kelahiran prematur, menurut WHO.

Pemodelan yang dilakukan awal tahun ini oleh Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa hampir 6.000 anak tambahan dapat meninggal setiap hari jika gangguan perawatan kesehatan Covid-19 berlanjut dalam jangka menengah.

Survei tersebut menemukan bahwa tujuh negara memiliki angka kematian anak lebih dari 50 kematian dalam 1.000 kelahiran hidup tahun lalu. Di Afghanistan, di mana 1 dari 17 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, kementerian kesehatan melaporkan "pengurangan yang signifikan" dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan, kata UNICEF. (ist)